

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Belanja modal merupakan perubahan yang fundamental di dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sebelumnya di dalam APBD, pengalokasian untuk jenis belanja berupa investasi, diklasifikasikan ke dalam belanja pembangunan. Layaknya belanja pembangunan, belanja modal dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk pengadaan asset daerah sebagai investasi, dalam rangka membiayai pelaksanaan otonomi daerah yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi belanja modal disesuaikan dengan kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana untuk kelancaran aktivitas kegiatan Pemerintah daerah tersebut.

Aset tetap yang diperoleh sebagai akibat belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh Pemerintah daerah. Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan juga terjadinya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan ini diprediksi dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya serius Pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas pendukung. Oleh sebab itu, dari berbagai jenis anggaran belanja daerah Pemerintah Daerah mengalokasikan dana berbentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset. Belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan maupun untuk fasilitas publik.

Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh Pemerintahan daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Secara spesifik sumber pendanaan untuk Belanja Modal belum ditentukan aturannya. Namun seluruh jenis sumber-sumber penerimaan daerah dapat dialokasikan untuk mendanai Belanja Daerah diantaranya Belanja Modal. Sumber-sumber penerimaan daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004) yang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan Belanja Daerah berasal dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Sedangkan Pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah, Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana cadangan daerah, dan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, Pemerintah pusat terus menghimbau Pemerintah daerah (pemda) agar persentasi belanja modal terus ditingkatkan sebesar 30 persen. Hal ini menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan sumber pendanaan daerahnya, sehingga dapat memiliki dana yang cukup memenuhi target alokasi anggaran Belanja Modal. Sesuai dengan prinsip Otonomi Daerah yang memberikan daerah tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Tanggungjawab kemandirian yang diberikan pada Pemerintah Daerah menuntut Pemerintah Daerah agar memiliki Sumber Daya Manusia yang handal dan juga kemampuan keuangan daerah yang optimal.

Belanja modal merupakan angka yang memberi gambaran tentang upaya Pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerahnya. Untuk mendorong pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah daerah perlu memberikan porsi yang lebih besar pada belanja modal dalam komposisi belanja daerah. Belanja modal yang disebut juga belanja pembangunan, mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Priyo Hari Adi (2006) pertumbuhan ekonomi yang selama ini terjadi sangat ditentukan oleh faktor belanja pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas publik dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dapat menjadi daya tarik bagi para investor. Hal ini dapat memberikan peluang pada peningkatan pendapatan per-kapita daerah dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin besar belanja modal berarti Pemerintah semakin serius dalam membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat. Namun saat ini komposisi belanja masih didominasi oleh belanja operasional terutama belanja pegawai.

Kemampuan daerah dalam meningkatkan anggaran belanja modal erat hubungannya dengan kemampuan daerah untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Kinerja keuangan Pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem Pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada Pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat

daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Ihyaul dalam Puspitasari,2012).

Kinerja keuangan daerah dapat dikatakan baik jika daerah tersebut memiliki tingkat kemandirian yang tinggi. Kemandirian merupakan kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan Pemerintahannya, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayarkan pajak dan retribusi kepada daerahnya. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan.

Kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah. Menurut Mardiasmo dan Saputra (2014) analisis rasio keuangan dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat juga dilakukan dengan membandingkan dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat atau potensi daerah yang relatif sama untuk dilihat bagaimana potensi keuangan Pemerintah daerah terhadap Pemerintah lain.

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya Pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Karena struktur laporan keuangan dan jenis Laporan Keuangan antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Swasta berbeda, maka rasio-rasio keuangan yang digunakan juga sedikit berbeda.

Sehingga pengukuran kinerja keuangan juga dapat dilakukan. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan (Mardiasmo, 2002). Rasio-rasio yang lazim digunakan dalam analisis kinerja keuangan Pemerintah daerah, merupakan perbandingan angka-angka dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rasio-rasio yang lazim digunakan dalam analisis kinerja keuangan Pemerintah daerah adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian Belanja dan Rasio Pertumbuhan.

Todaro (2003) dalam Sasana (2009) menyampaikan ada tiga faktor dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Akumulasi modal disini erat hubungannya dengan investasi. Kemajuan suatu daerah dapat ditunjukkan salah satunya dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, di mana salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah investasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah. Untuk dapat meningkatkan investasi, maka kemampuan keuangan daerah juga harus memadai. Indikator besar kecilnya investasi daerah adalah tingginya rasio belanja modal dalam APBD. Belanja modal pada Pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh baik tidaknya kinerja keuangan daerah. Dengan demikian terdapat keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi daerah dengan belanja modal serta kinerja keuangan.

Belanja modal merupakan angka yang memberi gambaran tentang upaya Pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerahnya. Untuk mendorong pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah daerah perlu memberikan porsi yang lebih besar pada belanja modal dalam komposisi belanja daerah. Belanja modal yang disebut juga belanja pembangunan, mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Priyo Hari Adi (2006) pertumbuhan ekonomi yang selama ini terjadi sangat ditentukan oleh faktor belanja pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas publik dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dapat menjadi daya tarik bagi para investor. Hal ini dapat memberikan peluang pada peningkatan pendapatan per-kapita daerah dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin besar belanja modal berarti Pemerintah semakin serius dalam membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat.

Terkait dengan hal ini, Sylvia, dkk (2015) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan Kabupaten / Kota Terhadap Belanja modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal Kabupaten / Kota di Sulawesi Utara pada tahun berikutnya. Pada penelitian ini data dianalisis menggunakan regresi berganda. Hasilnya memperlihatkan bahwa secara simultan variabel Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, efektivitas Belanja Modal, Efisiensi, dan Keserasian Belanja berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dan

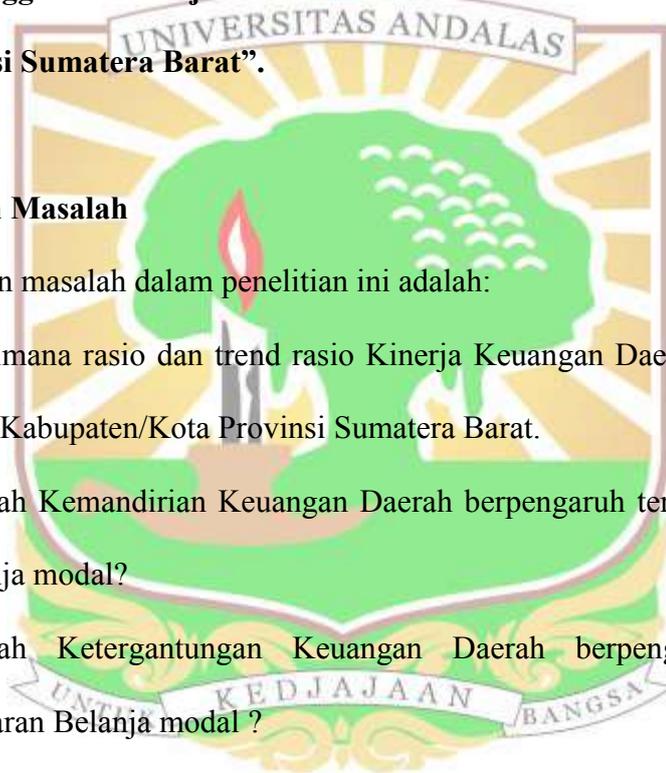
Efektifitas Belanja Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, menarik untuk diteliti tentang bagaimana peran kinerja keuangan mempengaruhi keputusan pengalokasian anggaran belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini diberi judul **“Analisis Kinerja Keuangan dan Pengaruhnya terhadap Anggaran Belanja modal Pemerintah Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana rasio dan trend rasio Kinerja Keuangan Daerah tahun 2009-2015 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.
- b. Apakah Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap anggaran Belanja modal?
- c. Apakah Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap anggaran Belanja modal ?
- d. Apakah Efektivitas PAD berpengaruh terhadap anggaran Belanja modal?
- e. Apakah Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap anggaran Belanja modal?
- f. Apakah Keserasian Belanja berpengaruh terhadap anggaran Belanja modal?



- g. Apakah Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergatangan Keuangan Daerah, Efektifitas PAD, Efisiensi Keuangan Daerah dan Keserasian Belanja Berpengaruh terhadap anggaran Belanja modal.

### 1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini menitik beratkan penelitian pada anggaran dan realisasi APBD Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2009 sampai dengan 2015.

### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui rasio dan trend rasio Kinerja Keuangan Daerah tahun 2009-2015 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.
- b. Mengetahui Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal.
- c. Mengetahui Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal.
- d. Mengetahui Efektivitas PAD berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal.
- e. Mengetahui Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal.
- f. Mengetahui Keserasian Belanja berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal.



- g. Apakah Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergatalungan Keuangan Daerah, Efektifitas PAD, Efisiensi Keuangan Daerah dan Keserasian Belanja Berpengaruh terhadap Anggaran Belanja modal.

### 1.5 Manfaat penelitian

Manfaat yang dapat diambil melalui penelitian ini adalah:

- a. Bagi Pemerintah

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya kinerja keuangan daerah dan dalam hal pengalokasian belanja Modal.

- b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam hal mengukur dan menganalisa kinerja keuangan dan pengalokasian anggaran belanja Modal pada Provinsi Sumatera Barat

- c. Untuk Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, acuan dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

